

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa mutlak perlu memiliki suatu dasar negara, sebab dasar negara merupakan rambu bagi arah suatu pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Sejalan dengan Mukadimah Undang Undang Dasar 1945, maka cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bukan saja sebagai dasar negara, tetapi sekaligus juga telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila ingin terwujud, maka pedoman atau cara-cara guna mencapai tujuan tersebut juga harus Pancasila. Sehingga, dapat dikatakan, dari (dasar) Pancasila - dengan (pedoman) Pancasila - untuk Pancasila. Jika salah satu komponen ini tidak terpenuhi, maka tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak mungkin dapat terwujud.

Pancasila pada aktualitasnya di negara Republik Indonesia dijadikan dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus terus-menerus meresap dalam kehidupan

manusia Indonesia dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku kehidupannya sehari-hari.

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, digali dari nilai-nilai luhur bangsa, baik nilai budaya, adat istiadat, nilai agama, maupun nilai-nilai perjuangan, terutama nilai-nilai dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang berlangsung ratusan tahun lamanya. Keterpaduan nilai yang mengkristal dalam rumusan lima sila yang saling jiwa menjiwai mulai dari sila ke satu sampai dengan sila kelima, merupakan satu sistem nilai dalam sistem filsafat kemanusiaan. Suatu nilai yang bersifat abstrak yang melekat pada diri setiap anak bangsa Indonesia, dimana unsur-unsur inti mutlak yang secara keseluruhan dan bersama-sama merupakan kesatuan dan menjadikan Pancasila ada. Sunarjo Wreksosuhardjo (2001:23) mengemukakan bahwa “Pancasila adalah dasar filsafat, asas kehormatan, ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia”.

Menurut Syarbaini (2003:21) filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai “refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia”. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam dan mendasar, kita harus mengetahui sila-sila yang membentuk Pancasila itu. Artinya, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai.

Sebagai ideologi, Pancasila merupakan keterpaduan dari diri manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat dipisahkan dengan dirinya sebagai makhluk sosial, yang menjadikan Pancasila terpisah dan berbeda dengan liberalisme, terpisah dan berbeda dengan komunisme, terpisah dan berbeda dengan

kapitalisme. Keterkaitan manusia sebagai makhluk individu dalam Pancasila, mencerminkan asas hidup yang berpangkal pada tingkat hubungan kodrat kemanusiaan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (sila kesatu), hubungan manusia dengan manusia (sila kedua), dan hubungan manusia dengan alam sekitar lingkungan (sila ketiga). Ketiga hubungan itu merupakan azas hidup, karena ketiganya adalah prasyarat untuk seseorang ada dan hidup. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial dalam Pancasila, mencerminkan hubungan kodrati dalam dinamika kehidupan yaitu hubungan manusia dengan berbagai perbedaan dan permasalahan yang harus dipecahkan dan diselesaikan secara demokratis (sila ke empat), dan hubungan manusia dengan ke-khalifan atau kepemimpinan, mengharuskan peran pemimpin yang adil dalam berbagai pengambilan keputusan (sila kelima).

Pancasila seperti tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan suatu bangsa dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Ada kepribadian kemanusiaan yang sangat penting dalam Pancasila. Kepribadian kemanusiaan merupakan sifat-sifat hakikat kemanusiaan abstrak umum universal yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, yang merupakan sifat hakikat manusia. Jika tidak demikian bukanlah manusia, jika tidak berkemanusiaan juga bukan manusia, jika tidak berpersatuan juga tidak manusia, dan jika tidak berkerakyatan dan berkeluargaan juga bukan manusia, serta jika tidak berkeadilan juga bukan manusia. Dengan demikian, lima unsur tersebut mutlak ada dalam diri manusia, sehingga disebut kepribadian kemanusiaan.

Mustafa Rejai (1991:34) menyatakan “ideologi itu tidak pernah mati, yang terjadi adalah *emergence* (kemunculan), *decline* (kemunduran), dan *resurgence of ideologies* (kebangkitan kembali suatu ideologi)”. Tampaknya, sejak awal

reformasi hingga saat ini sedang terjadi *declining* (kemunduran) pamor ideologi Pancasila seiring meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi dunia.

Implementasi nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan nilai Pancasila lebih penting ketimbang pembahasan-pembahasan secara teori. Saat ini yang diperlukan adalah bagaimana melaksanakan Pancasila. Pembahasan memang diperlukan tetapi orientasinya tetap pada pelaksanaan. Sebab pembahasan tanpa pelaksanaan sama saja menjadikan masyarakat Indonesia tuna Pancasila. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila diharapkan bisa menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya, Pancasila hanya menjadi barang sakral tanpa disertai pemahaman yang utuh.

Keberadaan Pancasila saat ini hanyalah sebagai simbol ideologi negara tanpa arti. Hal ini terbukti dari rentetan kasus seperti, koruptor yang semakin merajarela, penegakan hukum HAM yang belum selesai sejak Orde Baru, keadilan hukum yang masih tebang pilih, kesejahteraan ekonomi yang masih dinikmati segelintir elite penguasa, diskriminasi atas nama agama, konflik perbatasan, konflik antarsuku atau etnis, perdagangan manusia (*human trafficking*), semua itu adalah bukti konkret bahwa pemerintah hari ini telah gagal dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Memasuki era globalisasi yang kompetitif dan terbuka, nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 mulai memudar, terutama dikalangan pemuda dan pelajar yang pada dasarnya justru merupakan generasi

muda dan penerus cita-cita bangsa. Banyak pelajar yang tidak paham Pancasila sebagai dasar negara. Kondisi ini setidaknya mencerminkan mulai lunturnya wawasan kebangsaan di kalangan para pelajar. Gejala ini terutama terjadi pada pelajar di daerah perkotaan.

Pemahaman Pancasila di kalangan pelajar penting mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan salah satu falsafah yang mengikat persatuan bangsa. Pancasila juga merupakan salah satu dari empat pilar wawasan kebangsaan, selain pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhineka Tunggal Ika.

Sekolah adalah tempat hunian atau perkampungan masyarakat ilmiah atau masyarakat intelektual, maka harus mengamalkan budaya akademik. Warga sekolah harus berpegang pada komitmen moral yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan, bertanggung jawab secara moral, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara serta mengabdikan untuk kesejahteraan kemanusiaan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, masih banyak siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila. Banyak siswa yang tidak begitu hapal isi sila Pancasila, selain itu mereka juga sering kali terbalik-balik urutannya.

Begitu juga dengan pemahaman sila kelima Pancasila. Sila ini menekankan pada sikap kekeluargaan dan gotong-royong, saling menghargai hak orang lain, suka memberi pertolongan dan suka bekerja. Tapi pada kenyataannya, siswa

SMK Negeri 2 Bandar Lampung cenderung tidak menunjukkan sikap tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil observasi mengenai sikap yang berkenaan dengan pemahaman sila kelima Pancasila.

No	Aspek yang Diamati	Baik	Cukup	Kurang	Jumlah Siswa
1	Sikap kekeluargaan dan gotong royong			√	46
2	Menghargai hak orang lain		√		34
3	Memelihara kebersihan dan keindahan sekolah			√	48
4	Suka bekerja	√			23
5	Menghargai karya orang lain		√		30
6	Jumlah				181

Sumber: Observasi di SMK Negeri 2 Bandar Lampung

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya siswa kurang dalam implementasi makna dan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah siswa di atas adalah 181 siswa dari enam kelas, masing-masing tingkatan diambil dua kelas, berdasarkan observasi terdapat 94 siswa yang kurang mengimplementasikan makna dan nilai-nilai sila keadilan sosial. Sejalan dengan fakta di atas, ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Salah satu diantaranya adalah berkurangnya muatan pendidikan berkaitan dengan Pancasila. Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi sepertinya tidak terlalu diutamakan dan kurang mendapat perhatian baik dari kalangan pelajar

maupun pengajar sehingga tidak jarang para generasi muda yang mengabaikan dan tidak memahami akan makna yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Pemahaman yang benar akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan suatu langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri warga Indonesia, serta mendorong tumbuhnya rasa rela berkorban dan selalu ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan formal semestinya mampu memberikan porsi yang istimewa terhadap mata pelajaran yang menyangkut pemahaman nilai-nilai Pancasila sehingga diharapkan setiap generasi dapat mengerti akan cita luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Kemudian, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah juga turut mempengaruhi kurangnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945, telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku pelajar yang terjadi saat ini.

Reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai sebuah tata nilai luhur, Pancasila perlu

diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi’ sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dikalangan pelajar. Karena pelajar adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa membawa bangsa ini lebih baik di masa yang akan datang tentunya dengan cara pandang yang berwawasan kebangsaan disertai dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila tersebut diharapkan pelajar mempunyai sikap sosial yang baik pula, apakah itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Adapun sikap, lebih cenderung pada hasil dari belajar dan pengalaman yang pernah diterimanya, ia muncul sebagai suatu penilaian terhadap objek, karena sikap selalu merupakan penilaian terhadap suatu objek yang direalisasikan dalam suatu tindakan. Sikap lebih cenderung terkontaminasi oleh suatu nilai-nilai, norma masyarakat, bahkan agama. Yang pada akhirnya membentuk suatu sikap menjadi pegangan atau prinsip hidupnya.

Adapun tujuan dari penanaman sikap sosial pada anak secara umum adalah mengarahkan, membimbing dan memperkenalkan pada individu tentang norma-norma kehidupan sosial, agar individu memiliki sikap yang positif terhadap pola kehidupan sosial dan memiliki kesiapan mental dalam menghadapi heterogenitas kehidupan. Kehidupan sosial yang semakin kompleks semakin menuntut individu agar menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, namun sesungguhnya tidak semua pola kehidupan tersebut bisa diterima apa adanya. Dalam hal ini lebih ditekankan pada sifat afektif, dimana menumbuhkan rasa sosial menjadi tujuan utama dari penanaman sikap sosial.

Bedasarkan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara pemahaman sila keadilan sosial terhadap sikap sosial siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya implementasi nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar.
3. Sikap sosial dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar.
4. Pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima Pancasila berkaitan dengan sikap sosial siswa.

C. Pembatasan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dan agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya, maka penulis membatasi masalah yang diteliti, yaitu: pemahaman sila keadilan sosial dan sikap sosial siswa.

D. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah hubungan antara pemahaman sila keadilan sosial dengan sikap sosial siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2011/2012?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah hubungan antara pemahaman sila keadilan sosial dengan sikap sosial siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012.

2. Kegunaan Penelitian

2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memperkaya konsep-konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam bidang kajian tentang pemahaman sila keadilan sosial dan sikap sosial siswa.

2.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Tenaga Pengajar/Guru

Sebagai bahan masukan bagi para guru tentang pentingnya pemahaman sila keadilan sosial dalam pembentukan sikap sosial siswa.

b. Bagi Peserta Didik

Sebagai bahan masukan bagi siswa tentang pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.

c. Bagi Peneliti

Mengembangkan wawasan peneliti tentang Pancasila dan sikap sosial.

d. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi bagi penelitian lain dalam masalah yang sama atau terkait di masa yang akan datang

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas tentang hubungan pemahaman sila keadilan sosial dengan sikap sosial siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah pemahaman sila keadilan sosial siswa dan sikap sosial siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung.

3. Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung sampai selesai.